

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### Manajemen

Kalau ditinjau dari makna kata, “manajemen berasal dari akar kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan” (Echols dan Shadily 2010, hlm.372). Dalam memahami manajemen sangat identik dengan kegiatan organisasi. Sehingga “manajemen memiliki pengertian suatu proses kegiatan memimpin, memberikan bimbingan, serta mengarahkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Wardhana 2007, hlm.8).

Setiap organisasi dalam setiap kegiatannya pasti ingin berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan pada tiap tahapan sehingga semua tujuannya dapat tercapai. Untuk terlaksananya hal tersebut harus ada usaha yang serius dari orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri.

Setiap organisasi yang memiliki manajemen tentu berusaha menggunakan manajemen yang menurut mereka yang terbaik. Begitu juga manajemen yang digunakan oleh lembaga pendidikan yang ingin mengimplementasikan pendidikan Islam. Manajemen yang digunakan dalam mengimplementasikan pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan pengelolaan yang di ada pada pendidikan umum. Hanya saja pada pengelolaan dalam kurikulum Islam semua aktifitas yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai senantiasa merujuk pada ajaran Islam. Sehingga tujuan yang dicapai pun adalah tujuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Manajemen yang baik ialah manajemen yang tidak jauh menyimpang dari konsep, dan yang sesuai dengan obyek yang ditanganinya serta tempat organisasi itu berada. Pidarta (2011, hlm.19) menyebutkan bahwa “untuk mendapatkan sebuah

manajemen yang baik, setidaknya manajemen tersebut harus fleksibel, efektif, dan efisien”. Manajemen yang fleksibel ialah dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi. Manajemen ini tidak kaku, ia dapat berlangsung dalam kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Manajemen yang efektif, manakala pekerjaan dalam manajemen itu memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan semula, dengan kata lain kalau pekerjaan itu sudah mampu merealisasikan tujuan organisasi dalam aspek yang dikerjakan itu. Sedangkan manajemen yang efisien, menurut [Pidarta \(2011, hlm.25-26\)](#) dapat diperoleh dengan cara: *Pertama*, pengerjakan segala sesuatu dengan benar. *Kedua*, kalau terjadi permasalahan dalam organisasi hendaklah segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya. *Ketiga*, mengamankan sumber-sumber pendidikan dengan cara mengoordinasi sumber-sumber itu dengan sebaik-baiknya. *Keempat*, setiap petugas baik ia pegawai atau guru/dosen diharuskan mengikuti tugas-tugas pekerjaan. *Kelima*, setiap manajer diharapkan dapat menekan biaya pendidikan dengan tidak mengorbankan produksi.

Ada sejumlah nilai yang ada pada umumnya bisa diterima dalam manajemen. Menurut Massie ([dalam Pidarta 2011, hlm.20](#)), bahwa “nilai-nilai yang dapat diterima dalam manajemen ialah kebahagiaan, ketaatan pada hukum, konsistensi, integritas, dan kesetiaan”. Kebahagiaan merupakan nilai tertinggi, bukan saja pada manajemen melainkan pada aktivitas manusia. Sebab seseorang yang merasa bahagia akan melakukan kegiatan sepenuh hati dengan memordukan materi. Ketaatan pada hukum, ini merupakan nilai penting dalam sebuah manajemen, karena manajemen sendiri pada hakikatnya menciptakan untuk organisasinya sendiri, berupa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan. Ciptaan ini perlu ditaati bila ingin administrasi berjalan dengan lancar. Konsistensi, ini dapat ditunjukkan melalui perilaku dan tata kerja yang setia atau patuh akan aturan. Kalau kesetiaan dan kepatuhan itu berlangsung lama maka terjadilah konsistensi yang berkelanjutan. Itulah yang diharapkan terjadi pada

manajemen. Integritas, ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan terutama oleh para pemimpin. Agar ia dapat diterima dengan baik oleh para anggotanya, maka ia perlu memiliki integritas pribadi. Seorang manajer adalah juga seorang pemimpin, maka ia perlu memiliki integritas pribadi.

Dalam proses manajemen terdapat beberapa fungsi yang dikemukakan oleh para ahli. Dari beberapa pendapat ahli tersebut salah satunya yaitu [Ramayulis \(2011, hlm.270-274\)](#) yang mengemukakan bahwa “fungsi manajemen secara garis besar meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)”. Fungsi-fungsi manajemen ini akan difungsikan pada proses implementasi manajemen berbasis sekolah yang ada di SDIT Menara Fitrah Indralaya.

#### *Perencanaan*

Kegiatan apapun jika ingin dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyimpang dari tujuan, maka sudah menjadi keharusan untuk memahami dan merencanakan kegiatan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Alquran Surah al-Hasyr ayat 18 berikut ini:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

Ayat tersebut menurut [Kementrian Agama RI Jilid ke-10 \(2012, hlm. 74\)](#) mengisyaratkan bahwa setiap orang harus memperhatikan apa-apa yang telah ia perbuat untuk kebaikan dan kepentingan masa depan. Oleh karena itu setiap orang harus mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin setiap perbuatan atau kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuannya akhir.

Dalam proses manajemen, “perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut

mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Veithzal dan Sylviana 2009, hlm.141-142).

Perencanaan ini dapat terlaksana secara baik dengan memenuhi beberapa unsur yang dikemukakan oleh Hamalik (2010, hlm.136) berikut ini:

1. Tujuan dirumuskan secara jelas.
2. Komprehensif, namun jelas bagi staf dan para anggota organisasi.
3. Hierarki rencana yang terfokus pada daerah yang paling penting.
4. Bersifat ekonomis, mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia.
5. Layak, memungkinkan perubahan.

Satu unsur umum dari semua perencanaan adalah waktu, pembatasan waktu ini dapat digolongkan digolongkan dalam “(1) rencana jangka pendek, meliputi periode satu tahun atau kurang, (2) rencana jangka sedang, meliputi, meliputi lebih dari satu tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun, dan (3) rencana jangka panjang, meliputi lebih dari 5 tahun” (Sutisna 1983, hlm.164).

#### *Pengorganisasian*

Pengorganisasian (*organizing*) di dalam pendidikan merupakan sebagai “kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama pendidikan. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja, maka tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing organisasi” (Sagala 2009, hlm.49). Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa pengorganisasian pada pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang (guru dan personel sekolah lainnya) serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Kegiatan pengorganisasian yang diterapkan pada lembaga sekolah memerlukan langkah-langkah mendasar. Langkah-langkah tersebut secara beruntun yaitu “menentukan tugas, menentukan parameter waktu dan kebutuhan, menentukan jabatan dan tanggung jawab, merinci hubungan kewenangan, merinci hubungan pengawasan, merinci hubungan komunikasi, identifikasi kebutuhan koordinasi dan penyusunan

penetapan kriteria penilaian kerja, sehingga semua tugas dapat dikerjakan sesuai kewenangan masing-masing” (Sagala 2009, hlm.51).

### *Penggerakan*

Penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai sasaran yang dikehendaki dari rencana dan program. Usaha-usaha tersebut dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang ada dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada (Wardhana 2007, hlm. 11).

### *Pengawasan*

Pengawasan (*controlling*) dapat diartikan oleh Sagala (2009, hlm.59) “sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian dari hasil pengawasan tersebut apakah dilakukan perbaikan”. Pengawasan ini menurut Hamalik (2010, hlm.82) berfungsi “untuk memberikan penilaian, monitoring, perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan dalam sistem manajemen pendidikan tersebut”.

Prinsip-prinsip pengawasan meliputi: (1) strategi menentukan keberhasilan dengan mengukur perbuatan; (2) membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaan-perbedaan jika ada yang menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan; (3) responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan; (4) cocok dengan organisasi pendidikan dengan memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol para personel pendidikan; dan (5) memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan (Sagala 2009, hlm.60). Jadi, dalam operasional sebuah program “Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Ramayulis 2011, hlm.234).

## **Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

### *Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “*school-based manajement*”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat (Mulyasa 2011, hlm. 24). Dalam pengertian secara umum, Manajemen Berbasis Sekolah menurut Veithzal (2009, hlm. 160) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar pimpinan sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, murid, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi manajemen ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan sekolah yang selama ini dikenal. Dalam konsep lama (bukan konsep MBS), birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro saja, tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro. Sementara sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, lingkungan sekolah, dan harapan orang tua. Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berfikir dari yang bersifat rasional dan pendekatan perspektif di dalam pengambilan keputusan pendidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasi secara utuh oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran untuk beralih kepada konsep manajemen berbasis sekolah sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang tengah dikembangkan.

*Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah ((MBS)*

Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi (Mulyasa 2011, hlm.29). Lebih lanjut karakteristik atau ciri-ciri MBS menurut Departemen of Education (Australia) dalam bukunya *Focus on School: The Future Organisation of Education Services For Student* (dalam Mulyasa 2011, hlm. 30) menyebutkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Tabel 1

Ciri-Ciri MBS

<b>Organisasi Sekolah</b>	<b>Proses Pembelajaran</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>	<b>Sumber Daya dan Administrasi</b>
Menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah	Meningkatkan kualitas belajar siswa	Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan semua siswa	Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan
Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri	Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah	Memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah	Mengelola dana sekolah
Mengelola kegiatan operasional sekolah	Menyelenggarakan pengajaran yang efektif	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf	Menyediakan dukungan administrasi
Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait ( <i>scool community</i> )	Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa	Menjamin kesejahteraan staf dan siswa	Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya
Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab	Program pengembangan yang diperlukan siswa	Kesejahteraan staf dan siswa	Memelihara gedung dan sarana lainnya.

(akuntabel) kepada masyarakat dan pemerintah			
--	--	--	--

### *Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*

Manfaat yang diberikan pada pendidikan oleh MBS menurut Mulyasa (2011, hlm. 25-26) berangkat dari MBS yang memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategis MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi, dengan melakukan eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Dengan demikian, MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan di sekolah. Melalui penyusunan kurikulum efektif, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua, misalnya, orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya.

### **Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

#### *Kurikulum*



Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan (Dakir 2010, hlm.3). Selanjutnya pada pasal 1 ayat 19 Undang-undang No.20 tahun 2003 (2007, hlm.5) tentang Sisdiknas mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Ini dapat dinyatakan bahwa kurikulum bukan sekedar mata pelajaran tetapi semua pengalaman yang dilakukan peserta didik dan digunakan sebagai landasan untuk pijakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan kurikulum yang dinamis, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan pembelajaran pada sebuah sekolah/madrasah, menurut Idi (2011, hlm. 363-364) ada dua tipe kurikulum yang tampak, yaitu *ideal curriculum* dan *actual curriculum*. Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa, *ideal curriculum* merupakan kurikulum yang dicita-citakan, dalam bentuk rencana, ideal, teks yang belum dilaksanakan. Sedangkan *actual curriculum* adalah kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Optimalisasi kualitas pembelajaran di sekolah/madrasah dapat dilihat pada sejauh mana adanya kesenjangan antara kurikulum ideal dan kurikulum aktual itu.

Struktur kurikulum dalam bentuk *ideal curriculum* pada tingkat satuan pendidikan dasar kurikulum KTSP yang secara umum dikeluarkan oleh pemerintah merupakan standar kurikulum yang digunakan oleh sekolah/madrasah untuk kelas satu

sampai kelas enam. Standar kurikulum SD/Mi tersebut dalam Muhaimin dan Sutiah (2009, hlm. 230) dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 2  
Standar Struktur Kurikulum SD/MI

Komponen
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama Islam
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Bahasa Arab
5. Matematika
6. Ilmu Pengetahuan Alam
7. Ilmu Pengetahuan Sosial
8. Seni Budaya dan Keterampilan
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
B. Muatan Lokal
C. Pengembangan Diri
Jumlah

Pada lembaga pendidikan Islam, struktur kurikulum yang digunakan sudah menjadi keniscayaan bahwa *ideal curriculum* yang ada menandung nilai-nilai keislaman. Dari *ideal curriculum* inilah yang menuntut kemampuan lembaga tersebut untuk mengelola dengan sistem yang terbaik agar dapat benar-benar terealisasi dalam kegiatan pendidikannya dan menjelma menjadi *actual curriculum*.

Sebagai pendidikan yang membawa ajaran Islam dalam segala prosesnya, maka “sumber utama pendidikan Islam adalah Alquran dan Hadits yang berisi kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam” (Ramayulis 2011, hlm.155). Dari dasar pendidikan Islam dapat dipahami bahwa kurikulum pendidikan Islam harus memiliki orientasi. Idi (2011, hlm.63) menyebutkan bahwa “orientasi kurikulum pendidikan Islam pada dasarnya perlu pengembangan pada tiga aspek yaitu hubungan manusia dengan Khaliknya (*habl*

*min Allah*), hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-nas*), dan hubungan dengan alam sekitar (*habl min al-'alam*)”.

Kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri tertentu. A-Syaibani (Qomar 2007, hlm.151) mencatat ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat, dan tekniknya.
2. Memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh.
3. Memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi ilmu dan seni, kemestian, pengalaman, dan kegiatan pengajaran yang beragam.
4. Berkecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa asing untuk perorangan maupun bagi mereka yang memiliki kesediaan, bakat, dan keinginan.
5. Keterlibatan kurikulum dengan kesediaan, minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan perorangan di antara mereka.

Beberapa ciri yang harus ada pada kurikulum pendidikan Islam yang dikemukakan oleh A-Syaibani di atas ternyata sejalan dengan *First World Conference on Muslim Education*. Ini menyebutkan bahwa hasil konferensi internasional tentang pendidikan yang dilangsungkan tahun 1977 di Mekkah, tahun 1980 di Islamabad, 1981 di Dhakha, dan 1982 di Jakarta yang merumuskan pembagian ilmu kepada dua, yakni ilmu-ilmu abadi (*perennial knowledge*), yang berdasar kepada wahyu Alquran dan Sunah. Kedua ilmu perolehan (*acquired knowledge*) termasuk di dalamnya ilmu-ilmu sosial, kealaman dan aplikasinya (Daulay 2012, hlm.156).

Lebih lanjut *First World Conference on Muslim Education* (dalam Daulay 2012, hlm.156), memaparkan dua jenis ilmu tersebut yang mesti tercakup dalam semua jenis, jalur dan tingkatan pendidikan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Ilmu-ilmu abadi (*perennial knowledge*):
  - a. Alquran:
    - 1) Qiraah, hafalan, dan tafsir.
    - 2) Sunah.
  - b. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau serta pengikut pengikut mereka.
  - c. Tauhid.
  - d. Ushul fikih/fikih.
  - e. Bahasa Arab.
2. Ilmu perolehan (*acquired knowledge*):
  - a. Imajinatif, seni Islam, arsitektur, bahasa, sastra.

- b. Science intelektual, sosial, filsafat, pendidikan, ekonomi, politik, sejarah, peradaban.
- c. Ilmu-ilmu kealaman, matematika, statistik, politik, ekonomi.
- d. Science terapan.
- e. Ilmu-ilmu praktis, perdagangan, ilmu administrasi, ruang angkasa, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan Islam pada dasarnya untuk memberikan pendidikan yang berisi segala keinginan yang ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu “kurikulum pendidikan Islam bersumber dari tujuan pendidikan Islam” (Idi 2011, hlm.61). Tujuan dalam pendidikan Islam menurut Abu Ahmadi (dalam Ramayulis 2011, hlm.134) meliputi empat tahapan, yaitu: “(1) tujuan tertinggi/terakhir, (2) tujuan umum, (3) tujuan khusus, dan (4) tujuan sementara”. Dari tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan ini, maka tujuan kurikulum pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Idi (2011, hlm.62) terasa tepat bahwa “tujuan yang akan dicapai dari kurikulum pendidikan Islam adalah membentuk anak didik berakhlak mulia, dalam hubungannya dengan hakikat penciptaan manusia”. Lebih lanjut Idi (2011, hlm.62) menyatakan bahwa “yang menjadi pokok dari materi kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan, aktivitas, dan pengalaman yang mengandung unsur ketauhidan”.

Tahap selanjutnya dalam mengimplementasikan kurikulum adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dalam penerapan kurikulum menurut Wahjosumidjo (dalam Qomar 2007, hlm.160-161) adalah sebagai berikut:

1. Pembagian tugas mengajar dan tugas-tugas lain perlu dilakukan secara merata, sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru.
2. Penyusunan jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar maksimal 5 hari per minggu, sehingga ada satu hari tidak mengajar untuk pertemuan MGMP.
3. Penyusunan jadwal kegiatan perbaikan dan pengayaan.
4. Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler.
5. Penyusunan jadwal penyegaran guru.

Salah satu tahapan pengorganisasian tersebut adalah penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. “Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang

secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah/madrasah” (Muhaimin dan Sutiah 2008, hlm.74). Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh [Sotjipto dan Kosasi \(2004, hlm.162\)](#), bahwa “kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (intrakurikuler) tidak erat terkait dengan pelajaran di sekolah”. Program ini dilakukan di sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan siswa, menambah keterampilan, mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat, minat, menunjang pencapaian tujuan intrakurikuler.

Tujuan dari pendidikan ekstrakurikuler adalah menurut [Hatimah \(2008, hlm.31\)](#) yaitu:

1. meningkatkan dan memantapkan pengetahuan siswa,
2. mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya pembinaan pribadi, dan
3. mengenali hubungan antar pelajaran dalam kehidupan di masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di antaranya adalah: “(a) materi kegiatan hendaknya dapat memberi manfaat bagi penguasaan bahan ajar bagi siswa, (b) sejauh mungkin tidak terlalu membebani siswa, (c) memanfaatkan potensi lingkungan, alam, lingkungan budaya, kegiatan industri dan dunia usaha, dan (d) tidak mengganggu tugas pokok siswa juga guru” ([Sotjipto dan Kosasi 2004, hlm.162](#)).

Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler menurut [Muhaimin dan Sutiah \(2008, hlm.75-76\)](#) mengacu pada jenis-jenis kegiatan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: (1) Sasaran kegiatan, (2) substansi kegiatan, (3) pelaksana kegiatan dan pihak-pihak yang terkait, serta keorganisasiannya, (4) waktu dan tempat, dan (5) sarana.

#### *Proses*

Proses pendidikan di sekolah adalah sebuah proses transformasi-produktif yang intinya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, bermutu, dan mampu memenuhi kepuasan

dari mereka (*user*) yang akan memanfaatkannya sebagai sumber daya produksi aktif di industri ataupun lapangan kerja lain (Suryadi 2012, hlm. 112).

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, dalam proses pembelajaran seorang guru mesti mempunyai sebuah kerangka yang jelas tentang langkah-langkah dan strategi yang perlu dilakukan. Langkah-langkah dan strategi yang dibutuhkan tersebut terangkum di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). “RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus” (Muhaimin dan Sutiah 2008, hlm.136).

Langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dirangkum sebagai berikut (Muhaimin dan Sutiah 2008, hlm. 137-145):

1. Mencantumkan identitas
  - a. Nama sekolah/Madrasah
  - b. Mata Pelajaran
  - c. Kelas/Semester
  - d. Standar Kompetensi
  - e. Kompetensi Dasar
  - f. Indikator
  - g. Alokasi waktu
2. Mencantumkan tujuan pembelajaran, berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetka/dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.
3. Mencantumkan materi pembelajaran, materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
4. Mencantumkan metode pembelajaran, metodenya menggambarkan penerapan kegiatan pembelajaran dalam silabus
5. Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang memuat unsur kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup
6. Mencantumkan sumber belajar
7. Mencantumkan penilaian, dengan menunjukkan teknik/jenis penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data.

Unsur penting dalam proses merancang pembelajaran adalah: pembelajar, kemampuan yang akan dipelajari, keterampilan/latihan/pelajaran yang akan dipelajari dengan baik oleh pembelajar, dan tingkat penguasaan atau target yang dicapai (Suryadi 2012, hlm. 113). Dengan terpenuhi unsur-unsur ini, maka proses harus mengacu pada

standar pembelajaran yang dikeluarkan oleh BSNP, yaitu sebagai berikut (Suryadi 2012, hlm. 114-116):

1. Sekolah/madrasah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya.
2. Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian.
3. Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkan dengan:
  - a) Model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses;
  - b) Melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi;
  - c) Mendorong kreativitas dan dialogis;
  - d) Tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan memprediksi;
  - e) Pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru.
  - f) Setiap guru bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
4. Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
5. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran.
6. Setiap guru bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara:
  - a) Merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir;
  - b) Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran;
  - c) Menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien;
  - d) Memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang kurang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat;
  - e) Memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya;
  - f) Mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

Proses dalam pembelajaran sangat berkaitan dengan metode. Metode terkait dengan menyampaikan teori, konsep, dan wawasan yang terdapat dalam berbagai bidang ilmu dinamai metode pengajaran. Metode pengajaran memiliki kedudukan yang amat strategis dalam mendukung keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Oleh karena itu metode pengajaran harus dikuasai oleh seorang guru agar mata pelajaran

dapat disampaikan secara efisien, efektif dan terukur dengan baik, sehingga dilakukan perencanaan dan perkiraan dengan tepat.

Beberapa teknik mengajar yang dianggap relevan dengan pendidikan Islam menurut Hadari Nawawi (dalam Ramayulis 2011, hlm.198-200) dapat dirangkum sebagai berikut: “(1) Mendidik secara keteladanan, (2) Mendidik melalui kebiasaan, (3) Mendidik melalui nasihat dan cerita, (4) Mendidik melalui disiplin, (5) Mendidik melalui partisipasi, (6) Mendidik melalui pemeliharaan”.

#### *Peserta Didik*

Secara umum yang dimaksud peserta didik adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada lembaga pendidikan tertentu (Suryadi 2012, hlm. 100). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 mengartikan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Peserta didik dalam kegiatan pendidikan Islam harus memiliki kecerdasan yang belandaskan pada nilai-nilai Islam. Kecerdasan peserta didik dalam pendidikan Islam menurut Ramayulis (2011, hlm.97) ada beberapa hal yang akan dicapai, yaitu meliputi: “(1) kecerdasan intelektual, (2) kecerdasan emosional, dan (3) kecerdasan spiritual dan kecerdasan qalbu”. Kecerdasan intelektual adalah, kecerdasan yang berhubungan dengan poses kognitif seperti berpikir, daya menghubungkan dan menilai atau mempertimbangkan sesuatu. Pada kecerdasan emosional terdapat beberapa aspek yang menunjukkan pada kecerdasan ini. Menurut Ari Ginanjar (dalam Ramayulis 2011, hlm.97) ada beberapa aspek, yaitu:

1. konsistensi (istiqamah)
2. kerendahan hati (tawadhu’)
3. berusaha dan berserah diri (tawakkal)
4. ketulusan (iklas), total (kaffah)
5. keseimbangan (tawazun) dan
6. integritas dan penyempurnaan (ihsan).



Selanjutnya kecerdasan spiritual, menurut Danah Yohar dan Ian Marshal (dalam Ramayulis 2011, hlm.106) adalah “kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas”. Sedangkan kecerdasan qalbiyah menurut Abdul Mujib (dalam Ramayulis 2011, hlm.108-109) adalah “sejumlah kemampuan diri secara cepat dan sempurna, untuk mengenal kalbu dan aktifitas-aktifitasnya, mengelola dan mengekspresikan jenis-jenis kalbu secara benar, memotivasi kalbu untuk membina hubungan moralitas dengan orang lain dan hubungan *ubudiyah* dengan Tuhan”.

#### *Tenaga Pendidik dan Kependidikan*

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 5 dan 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Aktifitas pendidikan pada lembaga sekolah memerlukan manajemen yang baik pada aspek tenaga pendidik dan kependidikan. Karena ada beberapa tujuan yang akan dicapai dengan adanya manajemen pada aspek ini. Menurut Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2011, hlm. 232) bahwa tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah:

1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi.
2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan.
3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompesasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu.
4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang

berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama.

5. Menciptaka iklim kerja yang harmonis.

Tenaga pendidik dan kependidikan juga memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Menurut [Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI \(2011, hlm. 233\)](#) hak dari tenaga pendidik dan kependidikan meliputi: (1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan (5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan kewajibannya adalah: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Menurut Hadari Nawawi dikutip [Ramayulis \(2011, hlm. 58\)](#) bahwa “guru adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Lebih khususnya diartikan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing”.

Dalam pendidikan Islam, pendidik yang ada di dalamnya memiliki tugas. “Tugas pendidik dalam pendidikan Islam secara umum adalah mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah, guna keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan secara khusus adalah sebagai pengajar, pembimbing, dan pemimpin” ([Ramayulis 2011, hlm.63](#)). Sehingga [Ramayulis \(2011, hlm.75\)](#) menyimpulkan bahwa “tugas pokok (peran utama) guru dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (1) tugas pensucian. Guru hendaknya mengembankan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat

mendekatkan diri kepada Allah SWT, (2) tugas pembelajaran, yaitu guru hendaknya menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik”.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas utama sebagai guru, maka seorang guru dalam pendidikan Islam harus memiliki kualifikasi sebagai berikut (Daulay 2012, hlm.179):

1. Memiliki kualifikasi ilmu sesuai dengan bidang yang diajarkannya.
2. Memiliki ilmu terapan (metodologis) yang akan digunakan dalam rangka mengkomunikasikan ilmu tersebut kepada peserta didik.
3. Memiliki akhlak, yaitu komitmen moral yang tangguh, konsisten, dan konsekuen menjalankan etika profesinya sebagai pendidik.
4. Cinta kepada profesinya (loyalitas).

#### *Sarana Prasarana*

Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran (Suryadi 2012, hlm. 125).

Ada dua hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasana sekolah, yaitu (Suryadi 2012, hlm. 126)

1. Fasilitas yang ada di sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang beranekaragam sifat dan keperluannya, baik secara individual maupun kelompok.
2. Fasilitas yang ada harus disesuaikan dengan kurikulum/program pendidikan yang akan dilaksanakan sekolah.

Dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium,

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sebuah kegiatan pendidikan dalam memenuhi sarana dan prasarananya harus disesuaikan dengan peserta didik pada semua aspek. Hal ini dengan tujuan agar sarana dan prasarana tersebut agar dapat membentuk sumber belajar yang efektif. Setiap pembelajaran tentu memiliki sumber yang dapat berfungsi sebagai media ataupun alat dari pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau penjelasan, berupa definisi, teori, konsep, dan penjelasan yang berkaitan dengan pembelajaran (Nata 2009, hlm.295).

Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran menurut Nata (2009, hlm.305-306) yaitu “meliputi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ketepatan dalam memilih media pembelajaran, objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik, serta keefektifan dan efisiensi”.

Jenis media pembelajaran dalam perspektif Islam ada dua, yaitu yang bersifat benda dan yang bukan benda. “Media yang bersifat benda seperti berupa Alquran, Hadits, Tauhid, Fiqh, Sejarah, gambar-gambar, Audio Recording, termasuk juga manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya (Ramayulis 2011, hlm.203). Sedangkan “media yang bukan benda di antaranya keteladanan, perintah/larangan, ganjaran dan hukuman (Ramayulis 2011, hlm.203-206)”.

### *Pengelolaan*

Lembaga pendidikan Islam yang mulai menyadari adanya berbagai tantangan dan kekurangan yang harus dihadapi, telah menimbulkan pemikiran para pejuang pendidikan dalam Islam untuk mengupayakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang dikelola secara baik, yaitu melalui manajemen berbasis sekolah. Hal ini sejalan dengan

isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 51 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Berdirinya lembaga pendidikan biasanya dipersiapkan dalam waktu yang cukup lama dalam mencapai tingkat kematangan. Mereka terlebih dahulu harus menyiapkan lahan sesuai kebutuhan, mencari dana dari berbagai sumber yang dimungkinkan, merekrut tenaga profesional, menyiapkan sarana dan prasarana, infrastruktur, sistem manajemen, kurikulum, dan berbagai konsep lainnya secara matang dan detail. Lembaga pendidikan yang dibangun dengan konsep yang demikian itu biasanya menjadi lembaga pendidikan yang tergolong maju dan modern (Nata 2010, hlm. 322).

Langkah-langkah mendasar dalam pengorganisasian program sekolah, menurut Gorton ( dalam Sagala (2009, hlm.51) secara beruntun yaitu “menentukan tugas, menentukan parameter waktu dan kebutuhan, menentukan jabatan dan tanggung jawab, merinci hubungan kewenangan, merinci hubungan pengawasan, merinci hubungan komunikasi, identifikasi kebutuhan koordinasi dan penyusunan penetapan kriteria penilaian kerja, sehingga semua tugas dapat dikerjakan sesuai kewenangan masing-masing”.

Struktur dalam sebuah organisasi menurut Dale (dalam Pidarta 2011, hlm.60) adalah “mekanisme organisasi. Pada struktur itulah ditentukan apa yang harus dikerjakan oleh setiap personalia organisasi dan di sini pula akan tampak pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa digabungkan di bawah satu ketua”. Dengan demikian struktur organisasi merupakan mekanisme kerja yang menggambarkan unit-unit kerjanya dengan tuga-tugas individu di dalamnya beserta kerja samanya dengan idividu-individu lain. Dan hubungan antara unit-unit kerja itu baik secara vertikal maupun horizontal.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pengorganisasian pada pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang (guru dan personel sekolah lainnya) serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Beberapa saluran komunikasi yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan menurut [Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI \(2011, hlm. 282\)](#) dilakukan melalui beberapa saluran, di antaranya (1) transparansi laporan keuangan sekolah terhadap orang tua murid; (2) buletin sekolah; (3) surat kabar; (4) pameran sekolah; (5) open house; (6) kunjungan ke sekolah; (7) kunjungan ke rumah murid; (8) penjelasan oleh staf sekolah; (9) gambaran keadaan sekolah melalui siswa; (10) melalui radio dan televisi; (11) laporan tahunan dan lain-lain.

### *Pembiayaan*

Bila kita berbicara pembiayaan maka kita sedang membicarakan keuangan. manajemen keuangan menurut [Suad Husnan \(dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI 2011, hlm.256\)](#) adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan keuangan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana.

Dalam pengelompokan individu mana saja yang memiliki peran dalam manajemen keuangan ini kalau berdasarkan pada ruang perusahaan bisnis, menurut [Usry, Hammer \(1991\) dalam Suryadi \(2012, hlm. 117-118\)](#) dikelompokkan menjadi tiga kelompok: (1) kelompok manajemen tingkat pelaksana (*operational management*) meliputi para supervisor, (2) kelompok manajemen menengah (*middle management*), meliputi kepala departemen, manajer divisi, dan manajer cabang, dan (3) manajemen eksekutif (*executive management*) atau disebut juga manajemen puncak (*top management*) yang meliputi presiden, wakil presiden, dan beberapa eksekutif sebagai

penanggung jawab dari fungsi-fungsi: pemasaran, pembelajaran, produksi (*manufacturing*), pembiayaan (*finance*), dan akuntansi. Manajemen eksekutif secara prinsipil berkenaan dengan pembuatan keputusan jangka panjang, manajemen menengah berkaitan dengan keputusan jangka menengah, dan manajemen operasional berkaitan dengan pembuatan keputusan jangka pendek.

Sedangkan untuk pengelompokan dalam penggunaannya dalam pendidikan menurut Cohn dan Geske (1997) dalam Suryadi (2012, hlm. 121) meliputi dua kelompok, yaitu (1) biaya langsung (*direct cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, peserta didik, dan keluarga peserta didik, (2) biaya tidak langsung (*indirect cost*), seperti *forgone earning*.

Beberapa fungsi pembiayaan dalam manajemen organisasi sektor publik menurut Deddy Nordiawan (dalam [Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI 2011](#), hlm. 259) adalah sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan.  
Dengan fungsi ini organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian.  
Dengan anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan.  
Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.
4. Anggaran sebagai alat politik.  
Dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.  
Dengan dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit kerja lainnya.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kerja.  
Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
7. Anggaran sebagai alat motivasi.  
Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin dicapai. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya

jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun dan kemudian dirhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana tersebut dihabiskan (Muhaimin 2011, hlm. 359). Dengan rancangan yang demikian fungsi anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan akan dapat diefektifkan. Prosedur penyusunan anggaran di dalam pendidikan menurut Muhaimin (2011, hlm. 359) adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya.
3. Menentukan program kerja dan rincian program.
4. Menetapkan kebutuhan untuk melaksanakan rincian program.
5. Menghitung dana yang dibutuhkan.
6. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

### *Penilaian*

Penilaian dalam manajemen pendidikan didapatkan melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi. Muhaimin dan Sutiah (2011, hlm. 373). *Monitoring* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program sekolah/madrasah. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah/madrasah dengan kriteria tertentu untuk keperluan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program.

Lebih lanjut Muhaimin dan Sutiah (2011, hlm. 373-374) mengemukakan bahwa tujuan dari *monitoring* (pengawasan) adalah untuk mengetahui apakah program sekolah/madrasah berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah program sekolah, madrasah mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi menekankan pada aspek hasil (*output*).



Untuk melakukan *monitoring* (pengawasan) dan evaluasi secara internal pada lembaga sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah. Menurut Muhaimin dan Sutiah (2011, hlm. 377) bahwa *monitoring* (pengawasan) dan evaluasi fokus pada program. Dengan cara ini diharapkan kepala sekolah mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekolah/madarasah dan memberikan solusi jika terjadi masalah. Kegiatan ini dilakukan periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan dan untuk bahan konsultasi ketika ada *monitoring* dan evaluasi dari tingkat yang lebih tinggi.

Waktu pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah/madarasah pada program sekolah/madarasah menurut Muhaimin dan Sutiah (2011, hlm. 378) dilaksanakan secara periodik sepanjang tahun, misalnya setiap minggu. Dengan dilaksanakan setiap minggu diharapkan kepala sekolah/madarasah mengetahui betul perkembangan pelaksanaan program sekolah/madarasah yang sedang berjalan, dan sedini mungkin mengetahui kendala yang muncul sehingga dapat membantu penanggungjawabannya dalam mencari pemecahannya. Kepala sekolah sekolah/madarasah dibantu oleh tim guru juga perlu melakukan *monitoring* dan evaluasi yang memfokuskan pada evaluasi hasil program sekolah/madarasah pada akhir tahun akademik atau akhir pelaksanaan program sekolah/madarasah.

Pengawasan kurikulum merupakan usaha untuk pengendalian. Tahap pengendalian dalam penerapan kurikulum menurut Wahjosumidjo (dalam Qomar 2007, hlm.161) adalah:

1. Kepala sekolah perlu mengingatkan para guru bahwa evaluasi memiliki tujuan ganda, yaitu untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran khusus (TPK) dan mengetahui kesulitan siswa.
2. Hasil evaluasi harus benar-benar dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran.

Berhasil dan tidaknya program pendidikan sangat tergantung pada kemampuan yang dimiliki guru. Oleh karena itu kemampuan dituntut mutlak harus ada pada guru.

Dalam praktiknya sangat dimungkinkan sekali guru mengalami masalah dan kesulitan dalam prosedurnya dan mungkin juga ada yang merasa mendapat hambatan berkenaan dengan kelemahan dalam dimensi tertentu pada kemampuan profesionalnya. Pada kondisi seperti ini, maka menurut Hamalik (2010, hlm.191) “guru membutuhkan bantuan, bimbingan, arahan, dorongan kerja, bahkan nasihat dan petunjuk yang berguna baginya dalam upaya melaksanakan kurikulum tersebut.

Pengawasan pelaksanaan pembelajaran akan terfokus pada guru yang melaksanakan proses pembelajaran di kelas, karena dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum yang ada pada sebuah sekolah, guru bertanggung jawab mengimplementasikannya di kelas melalui proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Tingkat efisiensi itu ditentukan oleh derajat kelancaran yang ditempuh, sedangkan tingkat efektifitasnya ditandai oleh derajat keberhasilannya, yakni dalam bentuk perubahan perilaku para siswa, yang kita kenal dengan sebutan prestasi belajar.

Kepala sekolah yang juga berfungsi sebagai supervisor diwujudkan dalam kemampuannya menyusun dan melaksanakan program pembelajaran serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program pengawasan pembelajaran harus diwujudkan dalam penyusunan program pengawasan kelas.

Kemampuan memanfaatkan hasil pengawasan pembelajaran diwujudkan dalam pemanfaatan hasil pengawasan untuk meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan dan pemanfaatan hasil supervisi untuk mengembangkan sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor pembelajaran menurut Danim dan Khairil (2012, hlm.81-82) ia perlu memperhatikan prinsip-prinsip hubungan konsultif, kolegial dan bukan hirarkis; dilaksanakan secara demokratis; berpusat pada guru dan tenaga kependidikan; dilakukan berdasarkan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan; serta merupakan bantuan profesional.

Program pengawasan terhadap pembelajaran guru menurut Hamalik (2010, hlm.194) “program supervisi bertujuan mengembangkan dan mencapai proses pembelajaran yang relevan, dan efektif melalui peningkatan kemampuan guru. Penyusunan program pengajaran dan penyampaian pengajaran pada siswa”. Lebih lanjut Hamalik (2010, hlm.194) mengemukakan bahwa program pengawasan bertujuan untuk menghasilkan berbagai program kurikuler, antara lain:

1. Program pengajaran, yang meliputi susunan tujuan instruksional dan tujuan instruksional khusus, susunan materi dan kegiatan pembelajaran, alat dan saran penunjang pembelajaran.
2. Pembinaan kemampuan profesional guru secara berencana, efektif dan terus menerus, yang diselenggarakan dalam bentuk pertemuan secara berkala, bahan bacaan dan penataran dan sebagainya.
3. Program khusus yang berguna untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar.

Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran guru di kelas pada prinsipnya merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu guru dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam proses pembelajaran tersebut. Bantuan yang diberikan pada guru berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di kelas menurut Hamalik (2010, hlm.200-203) meliputi: *Pertama*, membantu guru mengembangkan kemampuan melaksanakan kurikulum, yang meliputi: menyusun unit pengajaran, menyusun rencana kerja, membuat satuan pelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan menyusun dan melaksanakan penilaian. *Kedua*, membantu guru mengembangkan kemampuan memilih dan menggunakan material kurikulum. Kemampuan dalam bidang ini mencakup kemampuan memilih dan menggunakan buku dan sumber bacaan lainnya, kemampuan memilih dan menggunakan alat peraga, kesulitan memilih sumber bacaan disebabkan karena harus berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. *Ketiga*, membantu guru mengembangkan kemampuan melayani perbedaan individual siswa. Guru perlu dilatih bagaimana cara menggunakan metode-metode tugas pekerjaan rumah, menyelenggarakan kerja kelompok, tutorial sistem, sistem pengajaran individu, dan teknik-teknik pemahaman individu. *Keempat*,

membantu guru mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah khusus. Seperti masalah kebebasan akademik dan masalah pembinaan disiplin di kelas.

Langkah lainnya adalah evaluasi hasil belajar. “Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa” (Sotjipto dan Kosasi (2004, hlm.162). Bila dikaitkan dengan pendidikan Islam maka “evaluasi berarti suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan Islam” (Ramayulis 2011, hlm.223).

Tujuan dan fungsi penilaian hasil belajar (Sotjipto dan Kosasi 2004, hlm.163) adalah:

1. Memberikan umpan balik kepada guru dan siswa dengan tujuan memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi siswa, serta menempatkan siswa pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya.
2. Memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat keberhasilan dalam belajar dengan tujuan untuk memperbaiki, mendalami atau memperluas pelajarannya.
3. Menentukan nilai hasil belajar siswa yang antara lain dibutuhkan untuk pemberian laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan kelulusan siswa.

Keberhasilan pembelajaran menurut Wina Sanjaya (dalam Nata 2009, hlm. 311) adalah “perubahan situasi proses pembelajaran dari pasif menjadi aktif, dari statis menjadi dinamis, dan dari tidak tahu (*don't know*) menjadi tahu (*know*), dari tidak mengerjakan sesuatu (*do nothing*) menjadi mengerjakan sesuatu (*do something*), dari yang semula tidak menimbulkan perubahan apa-apa (*not to be*), menjadi menimbulkan perubahan sikap (*to be*), dan dari yang semula tidak bernilai menjadi bernilai”.

### **Pendidikan Islam**

Pendidikan bila dihubungkan dengan Islam sering dikenal dengan pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam dalam penerjemahannya ada banyak yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan. Di antaranya menurut Muhaimin (2009, hlm.14), bahwa

“pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam, serta dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai juga oleh ajaran dan nilai-nilai Islam”.

Dikemukakan juga oleh Jalaluddin (dalam Akmal 2008, hlm.55) bahwa pendidikan Islam yaitu “usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi manusia secara optimal agar dapat menjadi pengabdikan Allah yang setia, berdasarkan dan dengan pertimbangan latar belakang perbedaan individu, tingkat usaha, jenis kelamin, dan lingkungan masing-masing”.

Berdasarkan paparan di atas yang menerjemahkan pendidikan Islam, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam upaya untuk membentuk manusia yang dapat berfungsi sebagai hamba yang dapat mengabdikan kepada Allah dengan berpedoman pada Alquran dan Hadits.

Pendidikan Islam, seperti pendidikan pada umumnya berusaha membentuk pribadi manusia, harus melalui proses yang panjang, dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Oleh karena itu dalam pembentukannya tersebut diperlukan suatu perhitungan yang matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan rumusan-rumusan yang jelas dan tepat. Maka pendidikan Islam harus memahami dan menyadari betul apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Suatu yang akan dicapai tersebut dalam pendidikan disebut dengan “tujuan pendidikan”.

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Sebab, tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu perumusan tujuan dengan tegas dan jelas, menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofi.

Tujuan tertinggi atau terakhir Pendidikan Islam adalah menjadi *insan kamil* (manusia paripurna), dengan indikator: (1) Menjadi hamba Allah, (2) Mengantarkan

peserta didik menjadi *khalifah Allah fi al-Ardh*, dan (3) Memperoleh kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat.

Dasar Pendidikan Islam dapat dibagi kepada tiga kategori yaitu: (1) Dasar pokok yang meliputi Alquran dan Sunah, (2) Dasar tambahan yang meliputi perkataan, perbuatan dan sikap para Sahabat, Ijtihad, Maslahah Mursalah (Kemaslahatan umat), Urf (Nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat), dan (3) Dasar operasional yang meliputi dasar historis, dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik, dasar psikologis, dan dasar fisiologis (Ramayulis 2011, hlm,122-131).

Pendidikan Agama Islam selain berperan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, juga berperan mempengaruhi nilai-nilai mata pelajaran umum (Ramayulis 2011, hlm. 44-45). Seperti kita ketahui bahwa mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah adalah ilmu pengetahuan produk Barat yang bebas nilai (*values free*). Agar mata pelajaran umum tersebut mempunyai nilai maka pendidikan agama Islam dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran – apalagi dalam kurikulum sekolah mata pelajaran pendidikan agama terletak pada urutan pertama. Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam inilah yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik.

Dalam mengimplementasikan pendidikan Islam pada sebuah sekolah, pembentukan nilai emosional peserta didik harus mendapatkan perhatian yang optimal, karena pada sisi ini akan membuat peserta didik tumbuh rasa cinta dan memiliki akan nilai-nilai keislaman yang sudah diprogramkan di sekolah. Oleh karena itu sekolah harus memiliki program yang perlu dimanajemen secara baik. Beberapa metode pendidikan Islam yang banyak kaitannya dengan sentuhan emosional yang sangat perlu di adakan di sekolah menurut Daulay (2012, hlm.78-79) adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan kehidupan beragama yang dapat dilakukan dengan pendekatan individual secara psikologis.
2. *Uswatun hasanah* (contoh teladan).

3. Seluruh tenaga pendidikan adalah menjadi guru agama, baik pasif maupun aktif sehingga berfungsi sebagai *uswatun hasanah* bagi peserta didik.
4. Malam ibadah. Diisi dengan berbagai aktivitas religius dengan menampilkan acara-acara yang mendorong untuk semakin tebalnya emosi beragama.
5. Pesantren kilat.
6. Laboratorium pendidikan agama.
7. Iklim religius.
8. Hubungan sekolah dengan rumah tangga.

### **Karakteristik Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)**

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan yang memiliki label Islam. Sekolah Islam terpadu pada hakekatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As Sunnah. Dalam aplikasinya sekolah Islam terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum (JSIT, hlm. 35). Lulusan yang diharapkan dari sekolah Islam terpadu ini disebutkan oleh Muhaimin (2009, hlm.106) bahwa sekolah terpadu adalah terbentuknya anak yang *zurriyyah qurrota a'yun* (anak/keturunan yang menyenangkan hati) yang pada gilirannya akan menjadi *imam li al-muttaqin* (pengayom bagi orang yang bertakwa). Untuk dapat dikatakan *zurriyyah qurrota a'yun* dan *imam li al-muttaqin*, Muhaimin (2009, hlm.107) menyebutkan ada beberapa profil yang harus dimiliki anak, yaitu: *pertama*, mereka senantiasa membaca Alquran dan sunnah, dan berusaha memahami ajaran Allah yang terkandung di dalamnya, serta berusaha menghayatinya; *kedua*, mereka harus memposisikan diri sebagai pelaku (*actor*) ajaran Islam; *ketiga*, mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam; dan *keempat*, mereka siap berdedikasi dalam rangka menegakkan ajaran dan nilai-nilai Islam yang *rahmatan li al-'alamin*.

Dari uraian di atas, dapatlah ditarik suatu pengertian umum yang komprehensif bahwa sekolah dasar Islam terpadu adalah sekolah Islam yang diselenggarakan dengan

memadukan secara integrative nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran efektif dan pelibatan yang optimal dan koperatif guru untuk membina karakter dan kompetensi murid pada tingkatan sekolah dasar.

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) merupakan anggota atau bagian dari organisasi yang bernama Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). JSIT Indonesia merupakan organisasi masyarakat yang berdiri pada tanggal 31 Juli 2003 dan bergerak di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah Islam terpadu yang berada dalam organisasi ini meliputi Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), dan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) ([Wikipedia. 2012. Available:http://id.wikipedia.org/wiki/](http://id.wikipedia.org/wiki/), diakses 17 Desember 2013).

Dalam prakteknya Sekolah Dasar Islam Terpadu menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan konatif. Sekolah dasar Islam terpadu juga memadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah dan jasaddiyah. Dalam penyelenggaraannya memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu sekolah, rumah dan masyarakat (JSIT, hlm. 35).